

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES), BLIMBING MAKMUR JAYA DI DESA
BLIMBING,KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT**

(Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam).

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
S.1 Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Amri Murta jaya (18050276042)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdra. Amri Murta Jaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Amri Murta Jaya

NIM : 1805026042

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Blimbing Makmur Jaya Di Desa Blimbing, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Heny Yuningrum, SE, M.Si

NIP. 198106092007102005

Rahmat Dwi Pambudi,
M.Si

NIP. 199107192019032017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Amri Murta Jaya
NIM : 1805026042
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Blimbing Makmur Jaya Di Desa Blimbing, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (ditinjau dari Sudut Pandang ekonomi Islam)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

28 Desember 2022

Serta, dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ekonomi Islam.

Semarang, 28 Desember 2022

Dewan Penguji,
Sekretaris/Sidang

Ketua Sidang

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt
NIP: 197912222015032001

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP: 198607312019031008

Penguji I

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP: 196904201990031002

Penguji II

Nurudin, S.E., M.M.
NIP: 199005232015031004

Pembimbing I

Heny Yuningrum, SE, M.Si
NIP: 198106092007102005

Pembimbing II

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP: 198607312019031008



NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-1736/Un.10.5/D.1/PP.00.9/05/2022

19 Desember 2022

Lamp. : -

Hal : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Heny Yuningrum, SE.,M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Amri Murta Jaya
NIM : 1805026042
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Blimbing Makmur Jaya
Di Desa Blimbing, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Ditinjau Dari Sudut Pandang
Ekonomi Islam).

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. – QS Ar-Rad 11

PERSEMBAHAN

Pada lembar persembahan ini, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan kesempatan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh ketulusan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu terbaik yang telah membesarkan, mendidik, menjagaku dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Teruntuk Ayah terima kasih sudah membiayai sekolah sampai bisa menmpuh pendidikan kuliah satrsa 1 dan tanggung jawab penuh terhadap keluarga. Teruntuk Ibu terima kasih sudah menjadi menjadi Ibu yang sangat menyayangi, mendidik dan selalu memotivasi dan melindungi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu.
2. Teman-teman dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah selama menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih sudah menjadi teman yang baik yang ada sampai sekarang untuk berbagi cerita. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab, kerendahan hati, dan kejujuran. Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Program Desa Wisata dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Objek Desa Wisata Desa Desa Wisata Kandri” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain, kecuali informasi yang tertera dalam referensi yang dijadikan sumber rujukan.

Semarang, 19 Desember 2022

Deklarator,



Amri Murta Jaya

1805026042

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf Arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Sehingga perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

A. Konsonan

Konsonan merupakan daftar huruf Bahasa arab yang literasinya kedalam huruf latin, yaitu:

ء = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = 'a	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam Bahasa arab ini berupa lambang tanda atau disebut sebagai lambang harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	U
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

A. Diftong

Vokal diftong atau vokal rangkap Bahasa arab apala lambang yang berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيا	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوا	<i>Fathah dan</i> Wau	Au	A dan U

B. Syaddah

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ al-thibb

C. Kata Sandang

Kata sandang (... ال(ditulis dengan al- ... misalnya الصناعة = *al – shina'ah*. Al – dituli ditulis dengan huruf kecil kecuali jika te terletak pada permulaan kalimat.

D. Ta' marbuthah

Setiap ta' martubhah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al – ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini berperan sebagai Peran Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan tentang pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa meliputi sektor pertanian, wisata dan UMKM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *filed research* meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui analisis deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori pembangunan desa, landasan teori pemberdayaan masyarakat, landasan teori tentang ekonomi kerakyatan dan landasan teori tentang BUMDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDES Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah baik pelaksanaannya. Disamping itu, pengelolaan BUMDES Blimbing Makmur Jaya belum dikelola dengan maksimal. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan dana anggaran, peran aktif akademisi ditingkatkan.

Kata Kunci : Peran, BUMDES, Kesejahteraan, Ekonomi Islam.

This research has the role of analyzing the role of Village Owned Enterprises (BUMDES) in improving the welfare of the people of Blimbing Village, Boja District, Kendal Regency. This study used a qualitative research method with a descriptive analysis type to describe the development of community welfare through Village-Owned Enterprises covering the agricultural, tourism and MSME sectors. Data collection techniques in this study used filed research including observation, interviews and documentation. Data were analyzed through descriptive analysis. This study uses the theoretical basis of village development, the theoretical basis of community empowerment, the theoretical basis of the populist economy and the theoretical basis of BUMDES. The results of the study show that the role of the Blimbing Makmur Jaya BUMDES in improving the welfare of the community has been well implemented. Besides that, BUMDES management in Blimbing Makmur Jaya has not been managed optimally. The recommendations given are to improve the quality of human resources, increase budget funds, increase the active role of academics.

Keywords: Role, BUMDES, Welfare, Islamic Economics.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Setelah menempuh proses yang cukup panjang, dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Blimbing Makmur Jaya Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi Islam ”. Skripsi ini disusun untuk menajadi salah satu syarat meraih gelar Sarjana (S1) pada ilmu Ekonomi Islm di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan rendah hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si.,selaku Pembimbing 1 yang selalu meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Dwi Pambudi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Arief Darmawan, M.Pd., selaku Wali Dosen penulis selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen dan Staf UIN Walisongo Semarang yang telah membagi ilmunya dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Ibrahim, Ibu Erna Dewi, dan Adik-adik penulis selaku keluarga penulis yang senantiasa selalu memberi dukungan, kasih sayang, motivasi dan doa yang selalu mengiringi penulis.
8. Sahabat maupun teman terdekat penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.

Terimakasih penulis ucapkan untuk semuanya atas kebaikan dan keikhlasan yang sudah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian masing-masing dengan hal yang lebih baik lagi. Aamiin Yaa Rabbal Allah

Semarang, 20 Desember 2022

Penulis

Amri Murta Jaya

1805026042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis pendekatan Penelitian.....	9
2. Sumber data Penelitian.....	10
a. Data Primer	10
b. Dokumentasi	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
a. Wawancara.....	10
b. Dokumentasi	11
c. Analisis Data	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pembangunan Pedesaan	13
B. Teori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	14
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	15
2. Ekonomi Kerakyatan.....	18
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	24
BAB III BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA BLIMBING KECAMTAN BOJA KABUPATEN KENDAL	29
A. Gambaran umum Desa Blimbing.....	29

1. Kondisi Geografis	29
2. Kondisi Domokrasi.....	30
3. Kondisi Ekonomi	31
4. Kondisi Sosial Budaya	32
B. Gambaran Umum BUMDES Blimbing Makmur Jaya	32
1. Organisasi.....	32
2. Tujuan BUMDES Blimbing Makmur Jaya.....	33
3. Visi Misi BUMDES Blimbing Makmur Jaya	33
4. Struktur Organisasi BUMDES Blimbing Makmur Jaya	33
C. Unit Usaha BUMDES Blimbing Makmur Jaya	34
1. Unit Serba Usaha.....	34
2. Unit Pengelolaan Sampah	35
3. Unit Pariwisata	35
D. Peran BUMDES Terhadap Masyarakat Desa Blimbing	35
E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUMDES.....	36

BAB IV PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BLIMBING MAKMUR JAYA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM	38
--	-----------

A. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	38
B. Peran BUMDES Blimbing Makmur Jaya Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam	42

BAB V PENUTUP.....	45
---------------------------	-----------

KESIMPULAN	45
-------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Blimbing

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Blimbing

Tabel 3.3 Data Pendidikan Penduduk Desa Blimbing

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Blimbing

Tabel 3.5 Agama Penduduk Desa Blimbing

Tabel 3.6 Jumlah Tempat Ibadah Desa Blimbing

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi BUMDES Blimbing Makmur Jaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sangat penting mensejahterakan penduduk guna menciptakan peningkatan kehidupan ke yang lebih baik pada bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, kesejahteraan penduduk di desa-desa, terutama di Indonesia masih tergolong rendah dan masih ditahap pertumbuhan untuk ditingkatkan dengan cara seperti memberdayakan daerah. Pemberdayaan daerah perlu waktu lama dibanding dengan pembenahan perpajakan dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dalam kaitannya sebagai kekuatan potensial guna mengatasi berbagai masalah baru, ataupun struktural yang melilit perekonomian Indonesia.¹

Pembangunan adalah bentuk kegiatan dalam memajukan suatu bangsa, termasuk pada proses perwujudan untuk cita-cita negara, yaitu menjadikan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan desa yang harus dilakukan pemerintah salah satunya agar menyentuh kebutuhan masyarakat desa adalah dengan cara pembangunan desa yang didasari sesuai pada potensi dan kelemahan desa tersebut. Guna mewujudkan pembangunan desa, peran partisipasi masyarakat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan masyarakat di desa tersebut lebih mengetahui permasalahan yang ada dan bagaimana potensi desa, sehingga dalam hal ini juga masyarakat adalah sebuah sentral dari proses pembangunan dari desa itu sendiri.

Pembangunan pedesaan memiliki peran besar pada konteks pembangunan nasional, karena mencakup sebagian besar wilayah nasional. Ada sekitar 70% penduduk di Indonesia menempati daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan di pedesaan perlu untuk terus ditingkatkan dengan cara pengembangan kemampuan SDM di suatu desa, sehingga kreativitas dan aktivitas di sebuah desa itu bisa terus berkembang, serta kesadaran lingkungan desa semakin meningkat.

Di dalam pembangunan sebuah desa, pemerintah desa memiliki peran yang berpengaruh sangat besar, terutama mengupayakan dalam menciptakan iklim agar

¹ Faisal Basri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 451.

mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di desa tersebut, dilakukan dengan cara penyampaian pesan-pesan pembangunan, dan penyaluran apresiasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah-daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan sendiri diarahkan guna pembangunan desa yang bersangkutan, dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dipunya (SDA dan SDM), meningkatkan keterkaitan pembangunan pada sektor perdagangan, industri dan juga pertanian antar desa, dan pastinya memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.²

Dinamika masyarakat pedesaan di Indonesia sudah mengundang perhatian dari banyak pihak, misalnya pada lembaga pendidikan, berbagai perusahaan baik swadaya masyarakat, tingkat nasional, lokal, bahkan luar negeri. Aktivitas pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilai guna memperkuat prinsip dari pembangunan pedesaan. Yayasan Penabalu *Saemaul Globalization Foundation* (SGF) mempunyai impian yang sama besarnya dengan desa-desa yang ada negara Indonesia. Kesamaan visi: pengembangan kemandirian, kesetaraan, penghargaan, dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat desa terutama dalam hal kerjasama (gotong royong) dan keswadayaan diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintah masyarakat desa.

Pengembangan basis dalam bidang ekonomi di desa-desa telah sejak lama dijalankan oleh pemerintah dengan berbagai program-program. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan hasil apapun, sebagaimana yang diinginkan bersama. Ada banyak faktor-faktor yang mengakibatkan kurang berhasilnya program yang telah dilakukan, salah satu faktor dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, yang menyebabkan terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat pedesaan dalam mengelola dan menjalankan mesin perekonomian di desa-desa. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berjalan secara efektif dan berimplikasi pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian di desa itu.³

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sudah melaksanakan perubahan paradigma pembangunan di daerah yang tertinggal

² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 63.

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), 2017, hal.1

dengan berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilaksanakan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup pada:

- a. Pengembangan kelembagaan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pengembangan ekonomi lokal
- d. Pembangunan sarana dan prasarana

Skala prioritas di atas diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda dalam perekonomian di desa-desa dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya yaitu, Badan Usah Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDES.⁴ Dengan ada bada usaha ini, pemerintah desa mempunyai hak untuk mengelola SDM dan SDA secara sendiri/mandiri, sehingga pemerintah di desa tersebut dapat membuat ataupun menentukan program yang pantas dengan mengacu pada potensi di desa itu. Karena itu, pemerintah desa serta masyarakat diperlukan untuk bermusyawarah guna memastikan bagaimana keperluan untuk jangka panjang ataupun pendek bagi desa tersebut. Sebagaimana di dalam QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Desa Blimbing adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, tepatnya terletak di Kecamatan Boja. Desa ini mempunyai kapasitas yang bisa dimaksimalkan dalam peningkatan kualitas perekonomian masyarakat, antaranya adalah pengelolaan sampah, tempat kuliner, dan wisata alam. Sampai saat ini ketiga kualitas perekonomian ini masih secara konsisten diproduksi. Potensi di Desa Blimbing ini diakomodasikan sebagai Badan usaha Milik Desa.

⁴ Kementerian Negara, *Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal*, <https://www.kemenegpdtd.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2019

Di tahun 2016, Pemerintah Desa Blimbing membentuk badan usaha ini, yang sekarang diberi nama dengan Blimbing Makmur Jaya. Ada beberapa bentuk usaha di dalamnya, antaranya adalah Unit serba Usaha, Unit Bank Sampah, dan Unit Prawisata. Secara perkembangan usaha, tidak semua bentuk usaha di dalamnya berjalan lancar. Misalnya, pada usaha Bank Sampah yang mengalami keugian dan tidak bisa membayar karyawan, sehingga dirubah menjadi bentuk usaha pengelolaan sampah. Bentuk usaha ini dibentuk guna penyedia jasa dalam pengambilan sampah rumah tangga untuk seminggu 2 kali, dengan tarif jasanya sebesar RP. 20.000/bulan. Saat ini, unit pengelolaan sampah hanya mampu merekrut 55 anggota. Dengan anggota yang sebanyak itu, unit ini belum bisa memberi *income*, karena pendapatan yang didapat hanya mampu untuk keperluan oprasional saja.⁵

Berbeda dengan BUMDES yang ada di Desa Orong Bawa Keca. Utan, salah satu desa yang telah memiliki BUMDES yang dibentuk pada Februari 2017. Usaha Desa ini sudah berjalan selama hampir satu tahu, walau belum berjalan lama, BUMDES terlihat perubahannya terutama di bidang pertanian. Hal dasar yang bisa dilihat dari perubahan di BUMDES ini adalah unit ini sangat gesit membangun perekonomian desanya, terutama pada pertanian dan pembangunan desa, sehingga secara otomatis membuar BUMDES tersebut berperan penting.⁶ Satu BUMDES yang tidak berjalan di Desa Orong Bawa ini adalah Kredit Sahabat, atau diberi nama dengan Jontal Betta yang bergerak pada simpan-pinjam, tetapi berfokus pada bidang pertanian, misalnya: penanam jagung, padi, atau lainnya. Namun, usaha ini belum berjalan efektif. Pemerintah di desa tersebut berharap dengan kehadiran usaha ini dan unit usaha di dalamnya, bisa meringankan warga dan meningkatkan pembangunan desa tersebut.

Sementara itu, BUMDES di desa Pagedangan terlihat berkembang pesat. Desa Pagedangan merupakan desa yang berada di Kab. Tangerang, dengan posisi wilayah yang strategis (titik perlintasan antara kabupaten/kota). Di mana posisi berada di lintasan jalan otonom, Kecamatan antara Legok dan Tangerang Selatan banyak dilintasi oleh masyarakat umum melewati jalan tersebut menuju pusat kota/kab/provinsi, pusat belanja modern, BSD, Gading Serpong Summarecon dan

⁵ Hasil wawancara dengan sutrisno (kepala desa) pada tanggal 1 Desember 2022

⁶ Ori Ade Kapanta, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa)" *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), Hal. 7

Paramaounth dan pusat perbelanjaan tradisional. Ini membuat pemerintah desa mempunyai ide, bagaimana Desa Pagedangan ini tidak hanya menjadi lintasan daerah, tetapi menjadi tempat singgahan masyarakat umum. Maka, pemerintah di sana berinisiatif membangun BUMDES sebagai penggerak perekonomian yang lebih baik di desa tersebut, yaitu dengan cara mengeksplor kuliner di Desa Pagadengan.

Pada tahun 2013, berdiri BUMDES di desa ini, dan tidak bisa dipungkiri bahwa, masyarakat beserta pemerintah desa bangga memiliki BUMDES yang belum lama berdiri ini telah dikenal orang. Pasalnya, ide ini menarik perhatian masyarakat bahkan masyarakat di luar seberang pulau yang melakukan *study banding* di desa ini. Dalam kurung dua tahun, BUMDES ini dapat bersaing dikancah nasional dengan tiga program utama.⁷

Selanjutnya, desa lainnya adalah Blang Krueng, yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan Baitussalam, Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh. Setelah diterjang tsunami pada tahun 2014 lalu, Desa ini memulai merencanakan pembangunan pendidikan, maupun ekonomi. Berdasarkan melalui informasi yang didapatkan dari Tribunnews Aceh, hanya dari sumbangan masyarakat setempat yang kurang lebih sebesar lima puluh juta rupiah, Desa Blang Krueng pada akhirnya bisa membangun desa yang maju dan meraih juara Desa terbaik se-Aceh, “Blang Krueng Gampong Terbaik se-Aceh Jumat 22 juli 2016).

Berdasarkan berita yang bersumber dari Radio Republik Indonesia pada 01 Nopember 2016, dengan judul berita “Kemendes Nilai BUMDes Blang Krueng Aceh Besar”, Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng menggerakkan sejumlah kegiatan selama ini, di antaranya usaha rumah sewa, depot isi ulang, toko gampong, handtraktor, sewa tratak, pelaminan, usaha pemeliharaan sapi, serta usaha pengembangan lainnya. Dari berbagai usaha yang telah dikembangkan ini, tentunya akan memberikan ransangan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Menurut kepala Desa, Badan Usaha Milik desa ini akan meningkatkan

⁷ Yeni Fajarwati, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang”, *Skripsi* (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016). Hal. 7

Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu, Badan Usaha ini terus dilakukan pengembangan.⁸

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas tersebut dan 3 perbandingan BUMDES di beberapa tempat daerah lain, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul. **“PERAN PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES), BLIMBING MAKMUR JAYA DI DESA BLIMBING, BOJA, KABUPATEN KENDAL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT. (DITINJAU DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas mengenai bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam sudut pandang Ekonomi Islam, maka yang menjadi fokus pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tata cara pengelolaan BUMDES Blimbing Makmur Jaya
- b. Agar mengetahui peran BUMDES dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat desa Blimbing menurut pandangan Ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

⁸ Nikmah Sholihati, “Peran Dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar”, *Skripsi* (Aceh Besar: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). Hal. 8

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada lembaga yang diteliti.

b. Secara Praktis

1. Bagi Lembaga yang diteliti, fokus studi diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi agar BUMDES lebih baik.
2. Bagi Peneliti, Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis sehingga sedikit banyak yang selama ini peneliti terima dan juga tentunya menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tasbih Fajri (2015) Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul *Judul Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*. Menurutnya Peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya didesa lobbo yaitu kepala desa sebagai komisaris yang di jabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Perannya sebagai komisaris dari hal perencanaan, komisaris menentukan unit usaha yang akan di kelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terjadi masalah dalam struktur organisasi pengelolaan BUMDes, dalam pelaksanaan kepala desa tidak terlalu aktif, namun didalam pelaksanaannya komisaris lebih banyak memberikan nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pelaksanaan BUMDes, pengawasan ini tentu diharapkan memberikan

kontribusi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam proses pengelolaan BUMDes gantung di desa lobbo, muncul berbagai faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik desa lobbo, koordinasi antara komisaris dan direksi kurang baik.⁹ Pada penelitian yang dilakukan M. Athsil M.A (2017) yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”. Hasil penelitian menunjukkan adanya BUMDesa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Pengelolaan BUMDes Desa Hanura dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam Kas Desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Hati Nurani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan BUMDes. Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat.¹⁰

Pada penelitian yang dilakukan Yuli Widyastuti (2017) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Pujokerto dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah

⁹Tasbih Fajri, “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hal. 133

¹⁰ M. Athsil M.A, “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran,” *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan, 2017), hal. 87.

dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) telah berdiri tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat di Desa Pujokerto yang telah diuraikan. Peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya diukur tentang materi saja tetapi juga non materi. Dalam pandangan Islam manusia dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kebutuhan primer (al-daruriyyah), kebutuhan sekunder (al-hajiyyah) dan kebutuhan pelengkap (al-tahsiniyyah). Masyarakat Pujokerto telah memenuhi ketiga kebutuhan tersebut maka sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam, BUMDES Sejahtera memberikan peran terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Pujokerto.¹¹

Pada penelitian yang dilakukan Nofiratullah (2018) yang berjudul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data salah-satunya data yang sulit di dapat tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDes. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama pengelola BUMDes, dalam komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif dan tidak ada jadwal rutin pertemuan/rapat para pengurus desa dengan para pengelola BUMDes sehingga komunikasi dilakukan saat penting saja. Kurang sosialisasi program BUMDes ini baik sosialisasi pemerintah daerah ke desa-desa mengenai kebijakan BUMDes sosialisasi maupun pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang dijalankan desa Soki sehingga masyarakat tidak banyak mengenai tentang pelaksanaan BUMDes. BUMDes AINA NEFA membantu masyarakat desa sebagian besar khususnya untuk keluarga pra sejahtera/tidak mampu untuk membuka usaha, menambah

¹¹ Yuli Widyastuti, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017), hal. 119.

modal petani bawang dan sebagainya.¹² Pada penelitian yang dilakukan Satika Rani (2018) yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan Kontribusi BUMDES Karya Abadi dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha sektor riil yaitu penyediaan alat-alat sembako, jasa pelayanan, peminjaman modal maupun penyewaan mesin mollen dan juga kontribusi yang diberikan BUMDES baik itu terhadap Pedesaan maupun kepada masyarakat seperti pengadaan seminar maupun penyuluhan tentang kewirausahaan. hanya saja jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masyarakat, peran maupun kontribusi BUMDES Karya Abadi ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Desa Karya Mulya Sari ini belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat Desa Karya Mulya Sari. Sedangkan Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan Penyediaan sembako maupun jasa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Abadi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi Islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat. maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut. Dan tidak hanya itu, masyarakat Desa Karya Mulya Sari sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam karena telah dapat memenuhi kebutuhan *al dharuriyyah, al-hajjiyyah, dan altahsinniyyah*.¹³

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian ialah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah (Coghlan & Brannick 2010; Collis & Hussey 2003; Leedy & Ormrodb 2005).

¹² Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,” (Malang : Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, 2018), hal. 120.

¹³ Satika Rani, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDES Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017), hal.

Setiap metode penelitian disusun berdasarkan dan dipengaruhi oleh asumsi filosofi penelitian yang dianut oleh sang peneliti. Metode penelitian yang berbeda mensyaratkan penguasaan kemampuan dan alat yang berbeda. Metode penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan¹⁴.

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan.¹⁵ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung turun dilapangan atau masyarakat, yang berarti data di ambil dari lapangan atau masyarakat¹⁶.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh¹⁷. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungannya¹⁸.

Dengan pendekatan ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang diteliti dalam hal Peran BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karnanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data¹⁹.

¹⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012, hal. 36.

¹⁵ Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 51.

¹⁶ Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 21.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 209.

¹⁸ Anselm Strauss dan Julian Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009. Hal.

¹⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 79.

Dalam penelitian sumber data meliputi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian²⁰. Sebagai subyek informasi sumber data ini diperoleh dari Kepala Desa Blimbing dan ketua BUMDES Desa Blimbing.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain²¹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan Kepala Desa Blimbing, Pengurus BUMDES Blimbing Makmur Jaya, dan Masyarakat Desa Blimbing. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada disekitar masalah²².

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

²⁰ *Ibid*, hal. 82.

²¹ *Ibid*,hal. 79.

²² Usman Rianse, Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta,2012, hal. 219.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya buku Monografi Desa Blimbing, AD/ART BUMDES Blimbing, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif²³

c. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian. Dalam teknik deskriptif kualitatif ada tiga langkah (persiapan, tabulasi, penerapan sesuai dengan pendekatan penelitian) yang meski dilakukan sebagai tahapan datanya. Tahap awal, adalah tahap persiapan, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu, yaitu data yang berhasil dikumpulkan²⁴.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama pendahuluan didalamnya akan memuat beberapa rincian yakni mengenai; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

tinjauan umum tentang Peran BUMDES dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam pembahasannya mencakup beberapa hal, yaitu: Gambaran umum tentang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Otonomi Desa.

²³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 82.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 278.

BAB III

gambaran umum BUMDES di desa Kandri. Dalam pembahasannya akan disajikan mengenai beberapa poin diantaranya tentang profil dan peran BUMDES di desa Blimbing,Boja,Kabupaten Kendal.

BAB IV

menganalisa Peran BUMDES dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam sudut pandang Ekonomi Islam.

BAB V

Penutup Dalam bab lima ini berisikan simpulan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Pedesaan

Dalam arti, pembangunan berasal dari kata kerja bangun, yang berarti tidak tidur, tidak diam, tetapi melakukan gerak atau tindakan. Dalam arti luas, pembangunan (*development*) merupakan suatu perubahan kebudayaan serta terencana (George M. Foster, 1973). Secara umum, konsep pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial (*social plan*) yang dilakukan oleh para perencana pembangunan, untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, pandangan tersebut diperkuat oleh Koentjaraningrat (1990:40).²⁵

Pembangunan dapat dijabarkan sebagai serangkaian upaya yang di rencanakan dan di laksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah, misalnya; badan-badan atau lembaga internasional, nasional, atau lokal yang terwujud dalam bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera dari pada sebelum adanya program pembangunan tersebut.²⁶

Pada awal kemerdekaan dalam pembangunan dikenal Rencana Kesejahteraan Kasimo atau Kasimo Welfare Plan (1952), pembangunan sering dikonotasikan dan identik dengan pembangunan pertanian karena berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Strategi pembangunan pertanian ini diibaratkan sebagai percikan minyak. Pada lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam demonstration plot yang memberikan contoh teknik bertanam yang baik dengan harapan teknik bertanam tersebut akan menyebar ke daerah-daerah sekitarnya.²⁷

Konsep perencanaan pembangunan berasal dari bawah (*bottom-up planning*). Sistem perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah bottom-up telah mengatur penyusunan perencanaan melalui kegiatan-kegiatan Musbangdes (*Musyawaharah Pembangunan Desa*) tingkat desa, rapat UDKP (Unit Daerah Kerja

²⁵ Eko Digdoyo, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hal. 117.

²⁶ Ibid, hal. 117.

²⁷ Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 73.

Pembangunan)tingkat kecamatan, Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) tingkat II (kabupaten) dan tingkat I (provinsi), serta Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) tingkat pusat, yang hingga sekarang ini belum dilaksanakan secara optimal.²⁸ Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasilnya.
2. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdarakan kemandirian lokal.
3. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah kedalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.²⁹ Menurut Haeruman(1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, adalah:

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pemabangunan pedesaan.³⁰

²⁸ Ibid, hal. 60

²⁹ Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996, hal.392.

³⁰ Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pemabangunan pedesaan.6

Pusat dari seluruh proses pembangunan desentralisasi adalah Desa, sehingga desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya. Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.³¹

B. Teori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1. Peningkatan

Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan. Seperti telah disebutkan di awal, peningkatan dapat berarti pula menaikkan derajat sesuatu atau seseorang, serta dapat pula berarti mempertinggi dan memperhebat. Peningkatan yang memiliki arti menaikkan derajat adalah dalam penggunaannya dalam kalimat “peningkatan jabatan dari staff menjadi kepala bagian”. Untuk peningkatan yang berarti mempertinggi, contoh penggunaan kalimatnya adalah seperti “Peningkatan standar kepuasan pelanggan sangat membebani produsen”. Sedangkan untuk peningkatan yang berarti memperhebat, contoh kalimatnya adalah “Perusahaan itu sedang gencar-gencarnya melakukan peningkatan teknologi agar keuntungan yang didapat lebih banyak”.³²

2. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian

³¹ Sapari Imam Asy'ari, Sosiologi Kota dan Desa, Surabaya: Usaha Nasional, 2004, hal. 56.

³² <https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal (11 januari 2019)

sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.³³

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa. Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Membentuk desa sebagai masyarakat berpemerintahan yang utuh, demokratis dan kuat antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat.

1. Membangun kepemimpinan desa yang maju, kuat dan merakyat melalui kaderisasi.
2. Mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat desa dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan.

³³ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-kesejahteraan-rakyat.html>, diakses tanggal (11 januari 2019)

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, memastikan kebijakan dan program pembangunan desa berpihak pada warga miskin, serta melakukan pendampingan pada masyarakat desa secara berkelanjutan yang sesuai dengan prioritas, potensi, dan kearifan lokal.³⁴

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1994).
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984).³⁵Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan publik.³⁶

Dahama dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

1. Minat dan kebutuhan, pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat;

³⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 57-58

³⁵ Ibid, hal. 58-59

³⁶ Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, Jakarta: LECPress, 2003, hal.21.

2. Organisasi masyarakat bawah, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan;
3. Keragaman budaya, pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya, perencanaan harus sesuai dengan budaya lokal;
4. Perubahan budaya, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya;
5. Kerjasama dan partisipasi, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang;
6. Kerjasama dan partisipasi, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang;
7. Belajar sambil bekerja, dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat "belajar sambil bekerja" atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan;
8. Penggunaan metoda yang sesuai, pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya);
9. Kepemimpinan, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan;
10. . Spesialis yang terlatih, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh;
11. Segenap keluarga, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial;
12. Kepuasan,pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.³⁷

³⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat "Dalam Perspektif Kebijakan Publik" Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 108.

Seiring terjadinya perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip (Soedjianto, 2001):

1. Kesukarelaan, keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dilaksanakan;
2. Otonom, kemampuan untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun, kelembagaan yang lain;
3. Keswadayaan, kemampuan untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar;
4. Partisipatif, keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya;
5. Egaliter, menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan;
6. Demokrasi, memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapat, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*;
 1. Keterbukaan, dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan;
 2. Kebersamaan, saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme;
 3. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun;
 4. Desentralisasi, memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom untuk mengoptimalkan sumberdaya.³⁸

Menurut Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), dan Grown (1987), dan Paul (1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.³⁹

³⁸ Ibid, hal. 108

³⁹ Mardi Yatmo Hutomo, Perencanaan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi), Jakarta: BAPPENAS, 2000.

2. Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Secara bahasa ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu negara. Sedangkan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴⁰ Ekonomi kerakyatan menurut Sarbini (Syahrir,1989), bukanlah suatu edilogi atau gagasan baru,tetapi sekedar percobaan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan,ekonomi kerakyatan bagi emil-asalim (swasono,1985),yang dikenal sebagai ekonomi pancasila,adalah pembangunan ekonomi yang meletakkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang memegang peranan sentral dalam system ekonomi yang terdiri dari berbagai sub-sistem masyarakat yaitu,petani,nelayan,buruh,masyarakat penawar jasa,dan sebagainya. Masyarakat berbagai sub-sistem tersebut. Sebagian besar berada di pedesaan yang tidak tergolong sebagai kaum menengah.⁴¹

Ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,di mana produksi dikerjakan oleh semua,untuk semua,dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan berjalanya roda perekonomian (Baswir,1993).⁴² Ekonomi kerakyatan berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dapat diterjemahkan sebagai suatu upaya interpretasi dari pembangunan Masyarakat adil dan makmur yang meletakkan masyarakat sebagai satu kesatuan pemegang peranan sentral dalam system ekonomi.

Demokrasi ekonomi seperti yang tertuang dalam GBHN 1993 menjelaskan bahwa rakyatlah yang bertindak aktif (berproduksi) dan pemerintah menciptakan iklim untuk mereka agar bertindak aktif dalam ekonomi. Dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi rakyat bagian masyarakat yang lebih kuat secara ekonomis,kuat dalam posisi kelembagaan organisasi sosial dan politik tentunya

⁴⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi%20kerakyatan> diakses pada tanggal 29 April 2019 pukul 17.00

⁴¹ Syafaruddin Alwi,*Pemberdayaan ekonomi rakyat*,JEP Vol.2 No. 2,1997, hal 168.

⁴² Mubyarto,dkk,*Ekonomi kerakyatan*.Jakarta:lembaga suluh Nusantara,2014, hal.111

dapat pula bertindak secara fungsional segaris dengan peran pemerintah untuk menciptakan iklim yang mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu menggunakan sumber daya yang tersedia untuk merubah nasib mereka.

Karakteristik kegiatan perekonomian pada suatu kawasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 sektor pertumbuhan (Soedrajad,1997), yaitu:

- a. Sektor pertumbuhan primer,yakni sector atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sector lain dalam perekonomian.
- b. Sektor pertumbuhan suplementer, yaitu sector yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sector pertumbuhan primer
- c. Sektor pertumbuhan terkait,merupakan sector atau ekonomi yang berkembang sejalan dengan kenaikan pendapatan,penduduk dan produksi sector industry.⁴³

Menurut Prof. Mubyarto, ciri-ciri ekonomi Kerakyatan adalah:

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh pergerakan ekonomi social dan moral
- b. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan pemerataan social yang disebut "*egaliterism*" yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan
- c. Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan system perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang enjiwai ekonomi
- d. Koperasi menjadi tiang tengah bagi rakyat,dan
- e. Adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam menunjang kesejahteraan social

Sedangkan menurut Prof.Sri Edi Swasno,ciri ekonomi kerakyatan adalah:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya ada etika moral yang berbasas Ketuhanan.bukan berdasarkan materialisme,tetapi berdasarkan syariah yang telah diciptakan Allah
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab,maksudnya ekonom yang modern atau ekonomi yang tidak mengenal kekerasan,penghisaban,ataupun riba
- c. Persatuan sosio-nasionalisme yang artinya ekonomi berdasarkan kekeluargaan,gotong royong, dan tidak saling mematikan

⁴³ Hernoyo Basah,*Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*,Jakarta:BAPPENAS:2004

- d. Kerakyatan berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak
- e. Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya yaitu kemakmuran rakyat yang paling utama.

2. Ekonomi Kerakyatan dalam Ekonomi Islam

Secara luas ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam masalah ekonomi, sesungguhnya dapat dipahami, karena persoalan ekonomi merupakan hal yang rentan terhadap perubahan. Perubahan tersebut di pengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dapat mempengaruhi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang berlaku.

Keadaan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kegiatan ekonomi mengalami berbagai bentuk kreasi baru. Seperti halnya bentuk dan kegiatan ekonomi yang pada sebelumnya belum ada dan sekarang berkembang sebagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Sebagai suatu sistem yang khas Indonesia demokrasi ekonomi tentu akan berbeda dengan sistem ekonomi yang berkembang dinegara lain. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi sudah tentu dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat serta ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika membicarakan sistem ekonomi di Indonesia maka akan dijumpai tiga macam wacana tersebut adalah, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), ekonomi pancasila dan ekonomi Islam. Bagaimana hubungan ketiga sistem ekonomi tersebut, apakah bisa dikatakan saling berhubungan, kesamaan atau justru ada perbedaan diantara ketiganya.

Dawam Raharjo misalnya mengatakan bahwa pembicaraan mengenai ekonomi Islam di Indonesia semestinya dilakukan dalam kerangka pembicaraan tentang ekonomi pancasila. Jika tidak orang akan mempertentangkan antara keduanya dengan motif politik. Menurut Dawam Raharjo kedua konsep tersebut masih berada dalam dataran pembentukan (*formative stage*). Namun secara substantif ekonomi Islam jauh lebih berkembang dibandingkan dengan ekonomi pancasila yang belum diterima oleh masyarakat karena konsepnya belum begitu

jasas.⁴⁴ Lebih lanjut menurut Dawam Raharjo, antara ekonomi pancasila dengan demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan) terdapat kesamaan dimana keduanya mengacu kepada kata-kata dan penjelasan pasal 33 UUD 1945.⁴⁵ Dan pendapat tersebut diperkuat lagi oleh Kuntowijoyo, mengapa sebuah sistem ekonomi yang lahir abad ke-7 (ekonomi Islam) bisa sama dengan sistem ekonomi yang lahir pada abad ke-20 (Ekonomi Pancasila).⁴⁶

Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam Surat An-Nahl: ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut yang berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِغْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah."

Ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi kepemilikan relatif. Dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam di antaranya adalah :

a. Nilai dasar kepemilikan

Dalam nilai dasar ini kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat relatif, karena pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah SWT

b. Nilai Dasar Keadilan

Setiap orang dalam Islam dituntut untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak orang lain. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan atau menguranginya. Ini artinya dalam bidang ekonomi seorang manusia dalam kehidupannya dituntut

⁴⁴ M. Dawam Raharjo, *Etika Politik Ekonomi : Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997, hal.107

⁴⁵ M. Dawam Raharjo, *Demokrasi Ekonomi Dalam Liberalisasi Ekonomi, dalam KumalaHadi (ed) Liberalisasi Ekonomi Dan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997, hal. 245

⁴⁶ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997, hal.142

untuk menjauhi semua praktik kedzaliman baik dalam mendapatkan maupun dalam mengelola harta atau kekayaannya.

c. Nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan

Manusia dalam pandangan Islam itu adalah bersaudara. Karena dia sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama keturunan adam. Ini artinya setiap orang dalam Islam dan dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan.

Oleh sebab itu dalam perilaku ekonominya kita harus bisa berbuat sesuatu dengan harta yang kita miliki dan yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya sendiri atau orang lain (*la dharara wala dhirara*).⁴⁷

Didalam sistem ekonomi Islam dapat kita tangkap, nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu sebagai berikut :

a. Kewajiban Membayar Zakat

Setiap orang yang memiliki harta atau kekayaan maupun penghasilan lebih yang telah sampai nisabnya dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat, karena dalam pandangan Islam bahwa setiap harta yang dimiliki seseorang dan didalamnya itu terdapat hak orang lain. Oleh karena itu yang bersangkutan harus mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya.

b. Jaminan Sosial

Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya ayat Al Qur'an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-orang yang fakir dan miskin serta orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

c. Pelarangan Riba

⁴⁷ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hal. 12

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktek kezaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus dihindari dan dihindarkan.

d. Kerjasama Ekonomi

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerja sama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat sekali dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh dan menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan. Hal itu terlihat dari firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ طَائِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudharabah dan atau koperasi yang intinya mendorong bagi terciptanya produktivitas ditengah tengah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, melindungi kepentingan ekonomi lemah.

1. Peran Negara

Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara dan atau pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar,

sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan moral dipasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap ditengah-tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah : ayat 112 :

الَّذِينَ اتَّابُوا الْعِبَادَةَ الْحَمْدُونَ السَّابِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'rif dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu."⁴⁸

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu AlQur'an dan As Sunnah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan Al Qur'an al Karim dan AsSunnah Nabawiyah.⁴⁹

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hal. 13-14

⁴⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 3

⁵⁰ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: KEMENDES, 2015, hal. 11.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

Dan menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵¹

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84).⁵²

⁵¹ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: KEMENDES, 2015, hal.11.

⁵² Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo,

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosialekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006).⁵³

2. Tujuan BUMDES

Empat tujuan utama pendirian BUMDES adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.⁵⁴

BUMDES dalam Pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

3. Keuangan BUMDES

Pada tahap awal pendirian BUMDES, akan banyak pertanyaan mengenai dari mana modal BUMDES didapatkan. berikut adalah pemaparan tentang Modal BUMDES menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135.

- a. Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 2.

- b. Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- c. Modal BUMDES terdiri atas:
 - 1. Penyertaan modal Desa; dan
 - 2. Penyertaan modal masyarakat Desa
- d. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- e. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari:
 - 1. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial dari ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - 2. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa
 - 3. Bantuan pemerintah daerah
 - 4. Asset dana yang diserahkan kepada APB Desa
- f. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.⁵⁵

4. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDES yakni:

a. Bisnis Sosial/*Serving*

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

b. Keuangan/*Banking*

BUMDES bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik

⁵⁵Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 Pasal 135.

warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa

c. *Bisnis Penyewaan/ Renting*

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya..

d. *Lembaga Perantara/ Brokering*

BUMDES menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDES memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

e. *Perdagangan/ Trading*

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

f. *Usaha Bersama/ Holding*

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

g. *Kontraktor/ Contracting*

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, permasok berbagai bahan pada proyek desa.⁵⁶

⁵⁶ <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdesyang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 20.30

BAB III

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA BLIMBING KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Blimbing

1. Letak Geografis

Secara geografis, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, terletak 30 kilometer dari ibu kota Kabupaten Kendal dan 16 kilometer dari Uin Walisongo Semarang. Desa Blimbing terdiri dari 5 dusun, 5 RW, 5 RT, yang mudah dijangkau adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa bebengan dan Desa Boja
Sebelah Selatan	: Desa Kaligading dan Kec.Singorojo
Sebelah Barat	: Desa Bebengan dan Kec.Singorojo
Sebelah Timur	: Desa Salamsari

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Blimbing

No	Jenis	Luas
1	Pemukiman	129,625 ha
2	Pertanian Sawah	102,300 ha
3	Perkantoran	2,00 ha
4	Sekolah	1,00 ha
5	Jalan	45,60 ha
6	Lapangan Sepak Bola	1,00 ha

*Sumber:*⁵⁷

2. Letak Domografi

Tabel berikut menunjukkan perincian jenis kelamin penduduk Desa Blimbing pada tahun 2022 berjumlah 2.572:

⁵⁷ Data RKPDesa Tahun 2022

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Blimbing

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki –Laki	1.297
2	Perempuan	1.275
	Jumlah	2.572

*Sumber:*⁵⁸

Hingga tahun 2022 tercatat jumlah penduduk di Blimbing sebesar 2.572 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebesar 930 KK. Dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini Desa Blimbing sudah lumayan baik, tingkat pendidikan yang dimaksud merupakan pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk desa. Jumlah penduduk di Desa Blimbing menurut data statistik penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Hingga 2022, Blimbing tercatat memiliki populasi sebanyak 2.572 jiwa, dengan total 930 kepala keluarga (KK). Dalam melakukan pendidikan Desa Blimbing sudah lumayan baik; tingkat yang dimaksud adalah sekolah yang telah diselesaikan penduduk setempat. Menurut perkiraan demografis berdasarkan pendidikan pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Blimbing adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Pendidikan Penduduk Desa Blimbing

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	693
2	Belum Tamat SD/Sederajat	126
3	Tamat SD/Sederajat	672

⁵⁸ Data RKPDesa Tahun 2022

4	SLTP/Sederajat	467
5	SLTA/Sederajat	506
6	Diploma I/II	5
7	Akademi /Diploma III/S.Muda	32
8	Divloma IV/Strata I	67
9	Strata II	3
10	Strata III	1
	Jumlah	2.572

Sumber:⁵⁹

3. Kondisi Ekonomi

Setiap orang harus berusaha mencari pekerjaan di berbagai bidang keterampilan mereka; Penduduk Desa Blimbing mencari nafkah dengan melakukan hal-hal berikut:

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Blimbing

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Mengurus Rumah Tangga	349
2	Pelajar/Mahasiswa	286
3	Pensiunan	10
4	Pegawai Negeri Sipil	27
5	TNI	7
6	POLRI	3
7	Perdagangan	34
8	Petani/Pekebun	324
9	Karyawan Swasta	431
10	Wiraswata	215

⁵⁹ Data RKPDesa Tahun 2022

11	Karyawan Honorar	4
12	Buruh Harian Lepas	218
13	Buruh Tani/Perkebunan	12
14	Pembantu Rumah Tangga	3
15	Belum/Tidak Bekerja	781
16	Karyawan BUMN	1

Sumber:⁶⁰

4. Kadaan Sosial Budaya

Sebanyak 2.572 orang tinggal di Desa Blimbing, dengan 98,78% di antaranya beragama Islam. Iklim keagamaan di Desa Blimbing secara umum positif, warga bekerja sama dan saling mendukung dalam acara-acara kemasyarakatan.

Tabel 3.5 Agama Penduduk Desa Blimbing

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.530
2	Kristen	34
3	Katholik	8
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	2.572

Sumber:⁶¹

⁶⁰Data RKPDesa Tahun 2022

⁶¹ Data RKPDesa Tahun 2022

Sarana tempat ibadah sangat penting dimiliki oleh sebuah Desa karena untuk melaksanakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Desa Blimbing memiliki tempat ibadah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jumlah Tempat Ibadah Desa Blimbing

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushola	9
3	Gereja	1
4	Pura	-
5	Vihara	-
	Jumlah	15

*sumber*⁶²

B. Sekilas tentang BUMDES Makmur Jaya

1. Organisasi

Pemerintah Desa Blimbing segera mendirikan Badan Usaha Milik Desa bernama BUMDES Makmur Jaya sesuai dengan rencana pemerintah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilengkapi dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES ini berdiri pada 13 Maret 2016, sesuai dengan persyaratan legislatif. BUMDES Makmur Jaya saat ini sudah beroperasi hingga tahun 2022.

Pemerintah desa bermaksud membentuk badan yang akan mengawal potensi Desa Blimbing guna meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dibentuklah BUMDES ini..⁶³

2. Tujuan BUMDES Blimbing Makmur Jaya

Tujuan dari berdirinya BUMDES Blimbing Makmur Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa,
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,

⁶²Data dari buku AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2017

⁶³ Hasil wawancara dengan Sutrisno (Kepala Desa) pada tanggal 2 Desember 2022

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan kerja,
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa,
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa,
- i. Mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.⁶⁴

3. Visi Misi BUMDES Blimbing Makmur Jaya

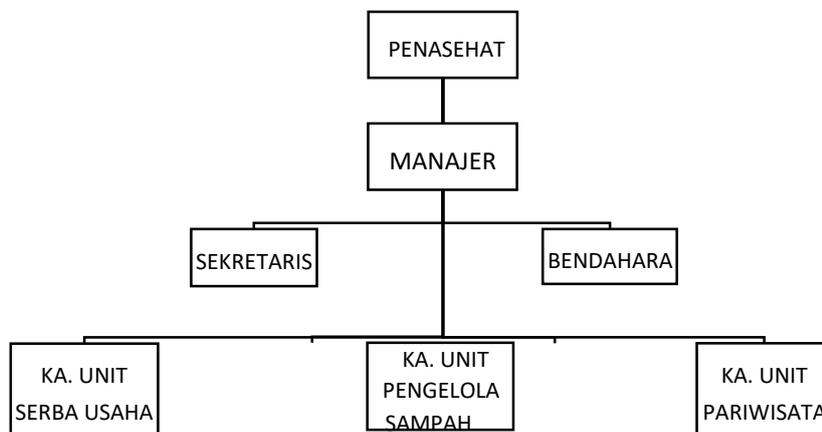
Visi BUMDES Blimbing Makmur Jaya adalah Berdikari.

Misi BUMDES Blimbing Makmur Jaya merupakan berikut:

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan
- b. Memberikan pelayanan yang maksimal
- c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
- d. Membuka pola wirausaha masyarakat Kewirausahaan syariah.⁶⁵

4. Struktur Organisasi BUMDES Blimbing Makmur Jaya

Bagan 3.1 Struktur Organisasi BUMDES Blimbing Makmur Jaya



Keterangan :

- Komisaris : Sutrisno (Kepala Desa)
- Manajer : Muhkhoirin
- Sekretaris : Nanang Aditya

⁶⁴ Data dari buku AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2022

⁶⁵Data dari buku AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2022

Bendahara : Uki Cita P

KA. Unit Serba Usaha : Mutaqin

KA. Unit Pengelola Sampah : Toto Sih Milono

KA. Pariwisata : Imron⁶⁶

5. Unit Usaha BUMDES Blimbing Makmur Jaya

BUMDES dibuat oleh Pemerintah Desa Blimbing untuk dijadikan sebagai wadah dan penggerak kesejahteraan masyarakat. Untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi Desa Blimbing, maka dibentuk pula BUMDES. Berikut daftar unit kegiatan BUMDES Blimbing Makmur Jaya

1. Unit Serba Usaha

Sebuah usaha bernama Serba Usaha memperdagangkan barang kebutuhan rumah tangga termasuk beras dan telur ayam kampung. Di Desa Blimbing, unit ini membeli beras dan telur ayam kampung dari petani dan peternakan unggas setempat. Selain itu, unit ini bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Blimbing. Unit ini didirikan dengan tujuan untuk menstabilkan kebutuhan pangan masyarakat desa Blimbing membeli dengan harga wajar dan menjualnya tanpa mencari keuntungan yang besar, karena masyarakat desa Blimbing dan sekitarnya merupakan segmentasi pasar dari unit ini. Sejak mulai beroperasi lebih dari tiga tahun lalu, entitas multi-bisnis ini telah menghadapi dinamika penjualan yang terus berubah..⁶⁷

2. Unit Pengelolaan Sampah

Unit usaha ini didirikan sebagai jasa pembuangan sampah rumah tangga. Usaha ini memiliki 55 unit tempat sampah yang diperoleh dari pemda, serta 1 unit sepeda motor roda tiga (pengangkut sampah). Ada sistem keanggotaan untuk layanan pembuangan sampah ini. Ada 55 orang yang telah mendaftar sebagai anggota hingga tahun ini, dan setiap anggota membayar iuran bulanan dengan biaya Rp. 20.000./rumah, Petugas

⁶⁶ Data dari buku AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2022

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Mutaqin (KA. Unit Serba Usaha) pada tanggal 02 Desember 2022

memberikan fasilitas kepada masyarakat yang sudah menjadi anggota, seperti layanan penjemputan sampah ke perumahan dua kali seminggu..⁶⁸

3. Unit Pariwisata

Unit Pariwisata bergerak dalam bidang wisata alam yang berupa wisata tubing, wisata tubing yaitu menyusuri saluran irigasi yang melintasi perkampungan. Pengelolaan wisata tubing ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah desa. Sistem pekerja sebagai penjaga di wisata tubing ini berjalan secara kondisional sesuai pengunjung yang datang dan tidak terikat, seluruh masyarakat bisa bekerja sebagai penjaga secara bergilir.

Pendapatan unit ini pada hari libur rata-rata dalam sehari kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000, total pendapatan dalam sehari tidak langsung disetor ke BUMDES. Namun, dalam 3 tahun terakhir ini Pariwisata sepi dikarenakan adanya virus Covid-19 dan adanya dilaksanakannya PPKM pendapatan yang semulanya 2.000.000 –Rp. 3.000.000. kini pendapatan berkurang menjadi Rp.1.200.000-Rp. 2.500.000. dan pendapatan juga berkurang terakhir ini dibagi terlebih dahulu kepada pekerja yang berjaga pada hari itu dengan pembagian hasil 70% disetor ke BUMDES dan 30% dibagi sesuai jumlah penjaga pada hari itu.⁶⁹

6. Peran BUMDES terhadap masyarakat Desa Blimbing

Keberadaan BUMDES di Desa Blimbing diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, meskipun BUMDES Blimbing Makmur Jaya sudah berjalan selama 6 tahun dan baru memiliki beberapa unit usaha saja, namun peranan BUMDES yang dijelaskan menurut Bapak Mukhoirin ialah BUMDES Blimbing Makmur Jaya ini telah memberikan peningkatan pendapatan ekonomi bagi masyarakat desa dengan berjualan maupun menyediakan tempat bilas di sekitar lokasi wisata tubing, serta mendapat jasa pelayanan lainnya, seperti yang diterangkan beliau:

“ya, kalau mengenai peranan BUMDES sudah berperan dalam meningkatkan ekonomi desa walaupun belum signifikan, karna BUMDES ini masih berkembang, yang pasti dengan adanya BUMDES masyarakat memiliki

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Toto (KA. Unit Pengelolaan Sampah) pada tanggal 02 Desember 2022

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Imron (KA. Unit Pariwisata) pada tanggal 02 Desember 2022

pendapatan tambahan”⁷⁰ Seperti yang telah dijelaskan, dengan adanya BUMDES masyarakat terbantu dalam meningkatkan pendapatan, selain itu, kebutuhan pokok yang harganya tinggi sekarang bisa di dapat di BUMDES dengan harga lebih terjangkau. Seperti keterangan warga sebagai berikut.

“Saya lebih memilih membeli beras di BUMDES ketimbang membeli beras dipasar, soalnya harga lebih terjangkau, kualitasnya tidak kalah bagus dari yang ada di pasar, selain itu juga lebih dekat dari pada harus membeli di pasar.”⁷¹

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa kehadiran BUMDES di Desa Blimbing membantu masyarakat desa dalam akses meningkatkan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, unit usaha BUMDES yang lain berupa pengelolaan sampah telah memudahkan masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk membuang sampah rumah tangga, sehingga lingkungan terhindar dari sampah rumah tangga.

7. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUMDES

Indikator keberhasilan BUMDES Blimbing Makmur Jaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang dimulai sejak tahun 2016 adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes meliputi :

1. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan di mulai pada tahap keikutsertaan masyarakat dalam membentuk BUMDES sebagai badan otonom Desa yang memiliki wewenang memobilisasi kegiatan usaha masyarakat. Partisipasi masyarakat selanjutnya dalam perencanaan adalah kehadiran masyarakat dalam sosialisasi dan perencanaan kegiatan BUMDES.

2. Pelaksanaan

Keikutsertaan masyarakat di dalam pelaksanaan dilakukan setelah dilakukannya perencanaan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDES. Seperti masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan wisata tubing yang dikelola oleh unit pariwisata.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Mukkhoirin (Manajer BUMDES) pada tanggal 02 Desember 2022.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Siti (Warga Blimbing) pada tanggal 10 Desember 2022

Pelaksanaan dilakukan setelah selesai perencanaan, dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh pengurus BUMDES. Masyarakat ikut dalam kegiatan pembangunan wisata tubing dengan membangun fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kenyamanan wisatawan, dan menjaga kebersihan lingkungan lokasi wisata. Setelah wisata tubing ini berjalan masyarakat bisa mencari pendapatan tambahan dengan cara membuka warung, parkir, dan bisa menjadi penjaga dilokasi wisata.⁷²

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi di butuhkan dalam kegiatan BUMDES agar semua unit usaha yang di bentuk BUMDES bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, pengawasan merupakan tugas dan kewajiban pengurus BUMDES, pemerintah desa, dan masyarakat.

Peran masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi sangat penting. Tahap ini masyarakat ikut dilibatkan guna mengawasi berjalannya setiap unit usaha yang dilakukan oleh BUMDES agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sutrisno sebagai berikut:

“ masyarakat harus berpartisipasi dalam segala kegiatan Desa. Apalagi saat ini, dana Desa kan sangat tinggi, kalo masyarakat tidak mengawasi dengan baik, takutnya ada penyimpangan yang dilakukan aparatur desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi adalah melaporkan setia gerak pengurus BUMDES dan aparat desa yang kurang baik.”⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Sutrisno (Kepala Desa) pada tanggal 11 Desember 2022

⁷³ Hasil wawancara dengan Sutrisno (Kepala Desa) pada tanggal 11 Desember 2022

BAB IV

PERAN PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BLIMBING MAKMUR JAYA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM

A. Peran BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BUMDES merupakan suatu badan usaha dalam mengelola potensi desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan di desa tersebut melalui peningkatan ekonomi. Banyak BUMDES yang telah berdiri setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, misalnya BUMDES di Desa Blimbing. BUMDES Desa Blimbing kurang lebih sudah berdiri enam tahun lamanya dan sudah memiliki beberapa unit usaha. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di Bab II, maka peneliti mengelompokkan beberapa jenis unit usaha BUMDES, antaranya sebagai berikut:

1. Serba Usaha

BUMDES sebagai perantara antara komoditas yang dihasilkan masyarakat desa tersebut kepada pasar yang lebih luas, sehingga BUMDES mem-perpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini bisa memberikan pengaruh ekonomi yang besar pada masyarakat setempat sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai oleh pemborong.

BUMDES Desa Blimbing sudah memiliki *Brokering*, yang mana Unit Serba Usaha ini bergerak di bidang perdagangan sembako, berupa beras dan telur ayam negeri. Unit ini bekerja sebagai pembeli kepada petani/peternakan di desa tersebut dan juga bekerja sama dengan sebuah kelompok tani di sana yaitu Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Hasil pendapatan dari unit ini cukup menguntungkan, sebesar Rp. 2.000.000– Rp. 3.000.000. sebagaimana dijelaskan oleh Pak Mutaqin selaku pengelola unit ini menerangkan:

“Penjualan beras dan telur naik turun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada tahun ini pendapatan per bulan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 dan pendapatan tertinggi dalam tahun ini mencapai sebesar Rp. 3.000.000/perbulan”⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Mutaqin (KA Unit Serba Usaha) pada tanggal 11 Desember 2022

Dari yang dijelaskan bapak Mutaqin, beliau menambahkan bahwa masyarakat lebih memilih membeli beras hasil petani di desa sendiri, selain berkualitas bagus, harga lebih terjangkau dari beras yang ada di pasar.

2. Pengelolaan Sampah

Melakukan pelayanan pada masyarakat setempat, sehingga warga setempat mendapatkan manfaat sosial secara langsung. Model usaha seperti ini, BUMDES tidak sama sekali menargetkan keuntungan seperti jenis bisnisnya adalah: pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya. Jenis *serving* BUMDES Blimbing Makmur Jaya yaitu Unit Pengelolaan Sampah yang dalam prakteknya adalah jasa pembuangan sampah rumah tangga. Unit usaha satu ini tidak mengambil/menargetkan keuntungan, melainkan sebagai fasilitator di antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Toto:

“Unit ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah rumah tangga dan mengajak masyarakat tertib tidak lagi membuang sampah di sungai maupun saluran irigasi yang sekarang menjadi wisata tubing, pengelola disini sebagai perantara warga yang bingung membuang sampahnya dengan warga yang bersedia bertugas mengambil sampah dan membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Warga yang sampahnya diambil seminggu dua kali oleh petugas membayar sebanyak Rp. 20.000/ bulan, dana tersebut untuk biaya operasional dan membayar petugas”⁷⁵

Dari Uraian tersebut dapat diketahui bahwa, unit ini hanya sebagai fasilitator semata, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa digunakan untuk keperluan biaya operasional dan membayar petugas pembuangan sampah. Bapak Mukhoirin juga menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“Unit Pengelolaan Sampah juga sebagai pengganti bank sampah yang sudah tidak berjalan, dalam pengelolaan sampah ini yang sudah bergabung sebanyak 55 anggota, setiap bulannya para anggota membayar sebesar Rp.20.000 untuk biaya transportasi, dan biaya warga yang menjadi petugas. Dalam sebulan unit ini bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Toto (KA. Unit Pengelolaan Sampah) pada tanggal 11 Desember 2022

1.100.000 namun keseluruhan pendapatan itu digunakan untuk biaya operasional dan membayar petugas”⁷⁶

Dari penjelasan Bapak Muhkhoirin dapat diketahui bahwa, unit ini adalah pengganti dari bank sampah yang tidak berjalan sebelumnya, pendapatan unit dalam sebulan sebesar Rp. 1.100.000 yang tidak disetor ke BUMDES.

3. Usaha Pariwisata

BUMDES membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan usaha lainnya, contohnya BUMDES mengelola wisata desa yang ada dan membuka akses luas pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu. Di desa Blimbing Makmur Jaya *holding* atau kerja sama yang terjalin ada di bidang pariwisata, di mana wisata alam yang berupa Wisata Tubing (Menyusuri saluran irigasi yang melintasi perkampungan).

Pendapatan yang masuk pada unit ini di setiap hari libur, dalam sehari kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000, total pendapatan dalam sehari tidak secara langsung disetor ke BUMDES. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Imron sebagai berikut:

“Wisata tubing ini memberikan pemasukan paling besar diantara unit usaha yang ada di BUMDES, pada tahun 2017-2018 saat lagi viral, pendapatan sehari saja bisa mencapai sebesar Rp. 1.700.000 itu hari biasa, kalau hari libur bisa mencapai Rp 4.000.000 lebih dalam sehari. tetapi dengan adanya Virus Covid-19 Pendapatan sangat menurun pesat mulai dari tahun 2019 akhir sampai 2021, dan wisata Tubing mulai berjalan lagi di akhir 2021, dan pendapatannya otomatis menurun dari Rp. 1.700.000- Rp. 4.000.000 per hari pada waktu hari libur kini menjadi Rp.1.000.000-Rp. 2.100.000 pada hari libur Bukan hanya gara-gara Virus Covid-19 pendapatan wisata Tubing menurun melainkan juga telah banyaknya wisata desa baru yang muncul dan banyaknya persaingan dari desa sekitar di sekitaran desa blimbing”⁷⁷

Dan Untuk pendapatan rata-rata pertahunnya dari seluruh Unit BUMDES dari penjelasan Bapak Muhkhairin selaku Pengurus BUMDES Blimbing

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Muhkhoirin (Manajer BUMDES) pada tanggal 11 Desember 2022

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Imron (KA. Unit Pariwisata) pada tanggal 11 Desember 2022

Makmur Jaya yaitu sebesar Rp 53.400.000 ini hanya dari Unit Serba Usaha dan Usaha Prawisata

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa unit usaha di BUMDES Blimbing Makmur Jaya ini sudah lumayan lengkap, yakni sudah ada unit usaha jenis Serba Usaha, *pengelolaan Sampah*, dan *Prawisata*. Namun, di BUMDES Blimbing Makmur Jaya belum ada unit usaha jenis lainnya seperti *Renting*, *Trading*, *Contracting*. Dari unit-unit usaha yang di BUMDES ini, unit usaha *Holding* yang menyumbang pemasukkan paling besar, dan berkembang pesat dari unit usaha yang lain. Unit usaha *Brokering* dan *Serving* dianggap telah berjalan dengan baik dan banyak peminatnya,

Setelah peneliti jabarkan terkait klasifikasi unit usaha BUMDES. Berdasarkan teori, peneliti juga menghubungkan dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Blimbing dalam pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah guna memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan wargasetempat dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasilnya. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Bapak Sutrisno:

“Pembentukan BUMDES tidak bisa lepas dari peran masyarakat itu sendiri, ya walaupun saya yang menggagas adanya BUMDES di desa ini, namun semua itu tidak lepas dari peran seluruh masyarakat yang terlibat dalam pembentukannya, ya tokoh masyarakat, kyai, sesepuh desa, pemuda desa dan yang terlibat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan”⁷⁸

BUMDES Blimbing Makmur Jaya dalam pembentukannya melibatkan komponen masyarakat yang ada di Desa Blimbing, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pejabat pemerintah desa yang bermusyawarah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan unit usaha yang ada di dalam BUMDES,

⁷⁸ Hasil wawancara dengan sutrisno (Kepala Desa) Pada Tanggal 02 November 2022

Komisaris mempekerjakan warga yang belum mendapat pekerjaan tetap dan bermitra dengan UMKM yang sudah ada di desa Blimbing. BUMDES Makmur Jaya dalam pelaksanaannya masih terkendala sumber daya manusia, berikut yang disampaikan oleh bapak sutrisno:

“Dalam pelaksanaannya, BUMDES ini belum bisa merekrut karyawan secara murni, ya baru mampu beberapa orang saja, karena minimnya upah atau gaji yang didapat dari hasil BUMDES, itupun yang mau kerja mengurus BUMDES secara sukarela karena pembagian hasil dibagi setelah satu tahun atau tutup buku.”

2. Pendekatan kemandirian yang memerlukan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal. Seperti yang disampaikan oleh bapak MuhKhoirin sebagai berikut:

“sebenarnya wisata tubing ini dibuat karena ingin menertibkan masyarakat dalam hal kebersihan, yaitu tidak membuang sampah dan membuang hajat di irigasi. Munculah ide untuk membuat wisata air tubing ini yang menyusuri irigasi sepanjang 500 meter dari pintu air sampai depan rumah pak kades atau tempat penyewaan perlengkapan untuk menyusuri irigasi.”⁷⁹

BUMDES Makmur Jaya mengelola potensi yang ada di Desa Blimbing sebagai alternatif Pendapatan Asli Desa (PAD), salah satunya wisata alam berupa wisata air tubing bumi parikesit. BUMDES Makmur Jaya memanfaatkan saluran irigasi sepanjang sekitar 500 meter dan lebar bervariasi dari dua meter hingga lima meter yang melintasi pemukiman warga. Saluran irigasi sebelum menjadi wisata diperuntukan untuk keperluan Kamar Mandi Umum warga sekitar irigasi.

Diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan BUMDES dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang memanfaatkan potensi di sekitar desa tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas. Masyarakat kurang berminat untuk ikut mengelola dan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Muhkoirin (Menejer Bumdes) Tanggal 11 Desember 2022

mengembangkan BUMDES dikarenakan belum adanya kejelasan tentang gaji yang didapat.

B. Peran BUMDES Desa Blimbing Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam

Peran BUMDES Desa Blimbing dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya perekonomian Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan suatu badan usaha yang mengelola potensi desa dengan tujuan dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat masyarakat desa melalui meningkatnya perekonomian Desa. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Blimbing Makmur Jaya di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BUMDES ini dapat membantu Kesejahteraan Masyarakat Melalui meningkatnya perekonomian masyarakat melalui jasa pelayanan, penyediaan sembako, dan wisata air tubing meskipun belum maksimal. Keadaan ini sesuai dengan anjuran Islam karena BUMDES mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk segelintir golongan saja, seperti yang terkandung dalam Surat An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.”

Ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi kepemilikan relatif. Didalam sistem ekonomi Islam dapat kita tangkap, nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

1. Unit Pariwisata

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerja sama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat sekali dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh

⁸⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta...*, hal. 13-14

dan menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong-tolongan dalam hal dosa dan permusuhan.

Dalam hal ini BUMDES telah sesuai dengan ekonomi Islam tentang Kerjasama Ekonomi. BUMDES memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi mengelola wisata air tubing. Dalam hal ini BUMDES telah sesuai dengan ekonomi Islam tentang Kerjasama Ekonomi. BUMDES memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi mengelola wisata air tubing.

2. Unit Serba Usaha

Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara dan atau pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar, sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan moral dipasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap ditengah-tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 112 :

النَّابِئُونَ الْعَيْدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّابِحُونَ الرَّكَّعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman."

Dengan ini, BUMDES Desa Blimbing sudah sesuai dengan ekonomi Islam. BUMDES dengan mampu menyediakan sembako yang dibeli dari petani di desa itu sendiri dan dengan upaya tersebut, BUMDES mengontrol agar tidak terjadi penimbunan.

3. Unit Pengelolaan Sampah

Melakukan pelayanan pada masyarakat setempat, sehingga warga setempat mendapatkan manfaat sosial secara langsung. Model usaha seperti ini, BUMDES tidak sama sekali menargetkan keuntungan seperti jenis bisnisnya adalah: pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya. Jenis *serving* BUMDES Blimbing Makmur Jaya yaitu Unit Pengelolaan

Sampah yang dalam prakteknya adalah jasa pembuangan sampah rumah tangga. Unit usaha satu ini tidak mengambil/menargetkan keuntungan, melainkan sebagai fasilitator di antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian dilapangan, maka peneliti menyimpulkan Peran BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Peran BUMDES dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat dapat dilihat dari peningkatan ekonomi Pedesaan. Dan telah terlaksana dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, seperti unit serba usaha, unit pengelolaan sampah, unit pariwisata. Selain itu BUMDES juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, BUMDES juga berkontribusi sebagai salah satu alternatif Pendapatan Asli Desa (PAD).
2. Peran BUMDES dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat menurut ekonomi Islam, prakteknya BUMDES Blimbing Makmur Jaya telah sesuai dengan sistem ekonomi Islam tentang Kerjasama Ekonomi dan Peran Negara. BUMDES memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi mengelola wisata air tubing. BUMDES juga telah mampu menyediakan sembako yang dibeli dari petani yang ada di desa Blimbing. Dengan upaya tersebut BUMDES mengontrol agar tidak terjadi penimbunan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan pengelolaan BUMDES kedepannya dapat dikelola secara profesional dan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan fasilitas yang diperlukan terutama untuk anggaran gaji pengelola BUMDES.\

3. Para akademisi yang ada diharapkan lebih aktif untuk memberikan dukungan pemikiran dan solusi yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Alwi, Syafaruddin. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, JEP Vol. 2 No.2, 1997.
- Basah, Hernowo. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, Jakarta: BAPPENAS, 2004.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), 2017.
- Digdoyo, Eko. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Imam Asy'ari, Sapari. *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2004.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997.
- Mardika Totok dan Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat "Dalam Perspektif Kebijakan Publik"* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*,

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Qodri, Ahmad. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, Jakarta: LECPess, 2003.

Raharjo, M. Dawam. *Demokrasi Ekonomi Dalam Liberalisasi Ekonomi, dalam Kumala Hadi (ed) Liberalisasi Ekonomi Dan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: PTIndeks, 2012.

Soewadji, Yusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Strauss Anselm dan Corbin, Julian. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Surya Putra, Anom. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: KEMENDES, 2015.

Soewadji, Yusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Usman Rianse, Abdi. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Yatmo Hutomo, Mardi. *Perencanaan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi)*, Jakarta: BAPPENAS, 2000.

M.A, M. Atshil. "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran," *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan, 2017).

Widyastuti, Yuli. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).

Tasbih Fajri, "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten

Bantaeng”(Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,” (Malang : Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, 2018).

Rani, Satika. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDES Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, 2017).

AD/ADRT BUMDES Blimbing Makmur Jaya Tahun 2016 Monografi Desa Blimbing Tahun 2022. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 Pasal 135

<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 20.30

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi%20kerakyatan> diakses pada tanggal 29 April 2019 pukul 17.00.

Kementerian Negara, *Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal*, <https://www.kemenegpdrt.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

<https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal (11 januari 2019).

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-kesejahteraan-rakyat.html>, diakses tanggal (11 januari 2019).

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA

1. Sejarah Bumdes di Desa Blimbing ?
2. Kapan Bumdes Desa Blimbing Mulai Aktif ?
3. Berasal dari mana saja dana untuk Bumdes ?
4. Apa saja kegiatan dan program Bumdes Desa Blimbing ?
5. Kendala apa Saja yang di hadapi para anggota Bumdes saat menjalankan kegiatan Bumdes ?
6. Bagaimana keantusiasan Masyarakat dalam kegiatan Bumdes ?

PENGURUS BUMDES

1. Apa saja program yang ada di Bumdes ?
2. Apa saja kendala dalam kegiatan Bumdes ?
3. Bagaimana pengurus mengatasi permasalahan dalam kegiatanBumdes ?
4. Bagaimana kerjasama di desa Blimbing dengan Bumdes lainyang ada di kecamatan Boja ?
5. Bagaimana pembuatan struktur pengurus Bumdes di DesaBlimbing ?
6. Siapa saja anggota Bumdes di desa Blimbing ?
7. Apa saja asset Bumdes desaBlimbing ?
8. Bagaimana implikasi kegiatan Bumdes terhadap perekonomian masyarakat desa Blimbing ?

MASYARAKAT

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Bumdes ?
2. Bagaimana partisipasi bapak/ibu dalam kegiatan Bumdes ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui semua program yang ada diBumdes ?
4. Apa saja Program Bumdes yang dapat meningkatkanpendapatan masyarakat ?
5. Apa saja kegiatan yang ada di Bumdes membantupermasalahan masyarakat khususnya keuangan ?

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Amri Murta Jaya
2. Tempat/Tanggal Lahir : Peparik Gaib, 05 Juli 2000
3. Alamat Asal : Dusun Mawar, Paya Kumer, Kec. Tripe Jaya, Gayo Lues.
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Nomer HP : 082235124856
7. Email : amrimurtajaya0055@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 05, Tripe Jaya. Kabupaten Gayo Lues Lulus 2012
2. SMP Negeri 01 Tripe Jaya, Desa.Rerebe, Kabupaten.Gayo Lues Lulus Tahun 2015
3. SMA Negeri Seribu Bukit,Kab. Gayo Lues Lulus Tahun 2018
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2018.

C. Pengalaman Organisasi

1. Ebi Sport Walisongo
2. PMII Uin Walisongo
3. Keluarga Imagas Semarang
4. KMA Walisongo
5. IMGL Nusantara

Demikian, biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2022



Amri Murta Jaya

